

# ANALISIS POLA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH DI KAWASAN PERKOTAAN JAKABARING

Heru Wahyono<sup>12\*</sup>, Fritz Akhmad Nuzir<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Teknik, Universitas Bandar Lampung

<sup>2</sup>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pangkalan Balai  
30911, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

<sup>3</sup>Program Magister Teknik, Universitas Bandar Lampung  
Bandar Lampung 35142, Lampung, Indonesia

\*Korespondensi email: heruwahyono40@gmail.com

## Abstract:

*Inconsistencies between spatial planning and the factual development of an area can lead to environmental degradation, which requires management that considers the balance between development needs and environmental sustainability. The purpose of this study is to analyze the land use conformity between 2013 and 2023 and the land use plan in the Spatial Planning Plan of Banyuasin Regency for 2019-2039, as well as strategies for controlling land use changes in the Jakabaring Urban Area, Banyuasin Regency. This research uses a mixed-methods approach, involving both qualitative and quantitative approaches with the help of spatial analysis techniques using Geographic Information Systems (GIS) and interviews. The results of the study show that the conformity to the spatial planning in Banyuasin Regency in 2018, with an area of non-conformity reaching 190.83 ha, occurred. The non-conformity with the spatial planning pattern was found in the existing land use of rice fields, which are designated for local protection areas, with an area of 136.97 ha. Meanwhile, in 2013, non-conformity to the spatial planning of Banyuasin Regency was found in the existing land use of swamp shrubs, covering an area of 94.67 ha, designated for local protection areas. In this study, the recommended strategy for controlling land use changes in the Jakabaring Urban Area of Banyuasin Regency includes efforts to control land conversion, namely minimizing the opportunities for land conversion, controlling land conversion activities, and using land conversion control instruments.*

**Keywords:** Land Use Change, Control Strategies, Land Conversion, Spatial Plan Inconsistency, Control Instruments.

## Abstrak:

Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan perkembangan faktual wilayah dapat menyebabkan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan yang memikirkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pemanfaatan lahan tahun 2013-2023 terhadap rencana pemanfaatan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039 dan strategi dalam pengendalian perubahan penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan Jakabaring, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode campuran (mixed methods), yang melibatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan bantuan teknik analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) dan wawancara. Hasil penelitian kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018 dengan luas ketidaksesuaian mencapai 190,83 Ha. Ketidaksesuaian terhadap rencana pola ruang RTRW terdapat pada penggunaan lahan eksisting berupa sawah dengan peruntukan pola ruang kawasan perlindungan setempat dengan luas mencapai 136,97 Ha. Sedangkan jika dilihat pada tahun 2013 ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah di Kab. Banyuasin terdapat pada penggunaan lahan eksisting semak belukar rawa dengan luas mencapai 94,67 Ha dengan peruntukan pola ruang kawasan perlindungan setempat. Dalam penelitian ini rekomendasi Strategi pengendalian perubahan penggunaan lahan di kawasan perkotaan Jakabaring Kabupaten Banyuasin dapat dilakukan dengan menerapkan upaya pengendalian konversi lahan, yaitu: meminimalkan peluang terjadinya konversi lahan, mengendalikan kegiatan konversi lahan, dan penggunaan instrumen pengendalian konversi lahan.

**Kata kunci:** Perubahan Penggunaan Lahan, Strategi Pengendalian, Konversi Lahan, Ketidaksesuaian Tata Ruang, Instrumen Pengendalian.

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan penggunaan lahan sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan akan ruang baru untuk permukiman, fasilitas publik, dan aktivitas komersial. Kawasan Jakabaring menjadi contoh nyata bagaimana urbanisasi dapat memicu perubahan drastis dalam struktur tata ruang. Pembangunan infrastruktur besar seperti Jakabaring Sport City untuk mendukung kebutuhan menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga berskala nasional dan internasional, telah mendorong transformasi wilayah ini. Selain itu, keberadaan fasilitas pendidikan, perkantoran, dan pusat perdagangan juga menjadi magnet bagi pendatang baru, yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan terhadap penggunaan lahan. Pembangunan infrastruktur, termasuk keberadaan venue olahraga setelah Asian Games Tahun 2018, menjadi satu diantara pendorong pokok perubahan pola penggunaan lahan di kawasan ini.

Akibatnya, terjadi konversi lahan pertanian dan kawasan hijau menjadi kawasan terbangun. Jakabaring juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Posisi geografis ini menjadikan kawasan tersebut sebagai wilayah dengan potensi besar untuk pengembangan ekonomi. Namun, perkembangan pesat yang tidak diiringi dengan perencanaan tata ruang yang baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Misalnya, perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau komersial dapat mengurangi ketahanan pangan lokal dan menyebabkan masalah lingkungan, seperti banjir dan degradasi tanah. Penelitian menunjukkan bahwa kawasan Jakabaring mengalami perubahan signifikan dalam pola penggunaan lahannya, terutama setelah pembangunan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan yaitu perubahan signifikan terjadi setelah kehadiran LRT. Lahan-lahan yang dulunya berupa rawa, tanah kosong, dan sawah kini telah bertransformasi menjadi kawasan permukiman yang ramai, pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang sibuk,

serta area perkantoran modern (Putri & Herwangi, 2023).

Selain itu, perubahan penggunaan lahan di Jakabaring juga dipengaruhi oleh urbanisasi yang menyebabkan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Data memperlihatkan bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Banyuasin menurun sebesar 2.330 hektar selama periode 2012 hingga 2016, sedangkan luas perkebunan meningkat signifikan (Putri & Yamin, 2018). Urbanisasi ini dapat berdampak pada hilangnya fungsi ekologis lahan hijau, seperti peningkatan risiko banjir akibat sistem drainase yang tidak memadai dan penurunan kualitas udara. Dinamika perubahan penggunaan lahan di kawasan Jakabaring juga mencerminkan interaksi antara kebijakan pemerintah daerah dan faktor sosial-ekonomi masyarakat. Peningkatan populasi, kebutuhan transportasi yang lebih baik, dan investasi swasta telah mempercepat perubahan tata ruang di kawasan ini. Namun, sering kali perubahan ini kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan, sehingga dapat menimbulkan dampak jangka panjang, termasuk kerusakan lingkungan dan konflik tata ruang.

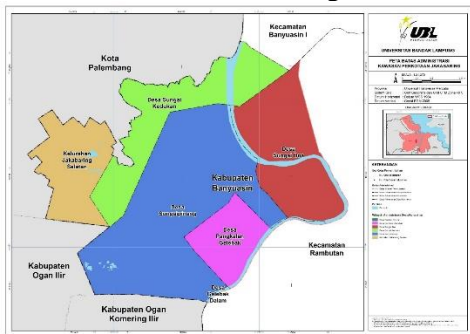
Eksisting lokasi penelitian di kawasan Jakabaring mencakup berbagai zona yang beragam, seperti zona permukiman, kawasan komersial, dan ruang terbuka hijau. Kawasan ini juga menjadi pusat aktivitas olahraga dan rekreasi, terutama dengan keberadaan Jakabaring Sport City. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan pola penggunaan lahan sering kali terkait erat dengan aksesibilitas wilayah, seperti pembangunan jalan tol atau sistem transportasi baru yang dapat meningkatkan tekanan terhadap lahan yang ada (Sigit & Setiawan, 2019). Selain itu, adanya pengaruh kebijakan pemerintah, seperti program pengembangan wilayah metropolitan, turut mempercepat transformasi kawasan ini (Sugiri, 2023). Selain itu, kesesuaian tata ruang di kawasan Jakabaring menjadi isu pokok yang perlu dicermati. Dalam

perencanaan tata ruang, diperlukan pengelolaan yang memikirkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan perkembangan faktual wilayah.

## 2. METODOLOGI

Lokasi penelitian ini terdapat pada Kawasan Perkotaan Jakabaring yang terdapat di Kecamatan Rambutan. Secara geografis Wilayah Perencanaan Perkotaan Jakabaring berada pada koordinat 3°0'35.29"LS sampai 3°4'22.83"LS dan 104°47'7.06"BT sampai 104°51'57.10"BT yang memiliki luas kurang lebih 3.709,28 Ha yang terdiri dari 5 kelurahan/ desa diantaranya meliputi Desa Sungai Dua, Desa Sungai Pinang, Desa Pangkalan Gelebak, Desa Sungai Kedukan dan Kelurahan Jakabaring Selatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Kawasan Perkotaan Jakabaring dapat dilihat pada Gambar 1 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Jakabaring, Tabel. 1 Luasan Administrasi Kawasan Perkotaan Jakabaring dan Gambar 2 Grafik Persentase Wilayah Kawasan Perkotaan Jakabaring.



Gambar 1. 1Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Jakabaring

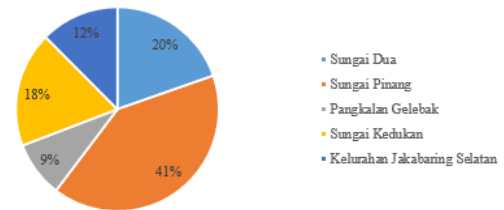
Tabel 1. 1 Luas Wilayah Administrasi Kawasan Perkotaan Jakabaring

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Rambutan	Sungai Dua	729,79	19,67%
2		Sungai Pinang	1.508,44	40,67%
3		Pangkalan Gelebak	329,96	8,89%

4	Sungai Kedukan	677,07	18,25%
5	Kelurahan Jakabaring Selatan	464,02	12,51%
Kawasan Perkotaan Jakabaring		3.709,28	100,00%

Sumber : Dokumen Fakta dan Analisa RDTR Kawasan Perkotaan Jakabaring

Grafik Persentase Wilayah Kawasan Perkotaan Jakabaring



Gambar 1. 2Grafik Persentase Wilayah Kawasan Perkotaan Jakabaring

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, Kawasan Perkotaan Jakabaring terdapat pada 5 Desa/Kelurahan yang terdiri atas Desa Sungai Dua seluas 729,29 Ha atau sekitar 19,68%, Desa Sungai Pinang seluas 1.508,44 Ha atau sekitar 40,67%, Desa Pangkalan Gelebak seluas 329,69 Ha atau sekitar 8,89 %, Desa Sungai Kedukan seluas 677,07 Ha atau sekitar 18,25% dan Kelurahan Jakabaring Selatan seluas 464,02 Ha atau sekitar 12,51 %.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif dimana proses penelitian mengarah pada pengungkapan masalah atau keadaan sebagaimana fakta yang ada. Hasil penelitian ini difokuskan untuk memberi gambaran tentang objek yang sedang diteliti penelitian deskriptif ini berusaha untuk mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan lahan aktual tahun 2013, 2018 dan 2023 terhadap rencana pemanfaatan lahan dalam RTRW Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019-2039. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah suatu pendekatan yang mengungkap gejala dan perubahan topologi serta pola pemanfaatan ruang. Pendekatan ini analisisnya menekankan pada distribusi satuan unit lahan yang akan dievaluasi pemanfaatannya dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019.

Tahapan penelitian ini yaitu tahap persiapan yaitu diawali dengan identifikasi permasalahan yang kemudian dirumuskan menjadi tujuan penelitian, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan tools overlay pada SIG sehingga menghasilkan satu peta baru yaitu peta kesesuaian pemanfaatan lahan yang akan dianalisis dengan analisis deskriptif, serta perumusan strategi penggunaan lahan yang menjadi dasar untuk menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

Dalam menganalisis kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW Kabupaten Banyuasin menggunakan peta dasar berupa peta citra yang sudah didigitasi dengan penggunaan lahan secara eksisting, serta peta RTRW Kabupaten Banyuasin untuk selanjutnya dilakukan overlay pada ArcGIS sehingga menghasilkan peta kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW Kabupaten Banyuasin. Dari hasil overlay tersebut diperoleh beberapa informasi terkait dengan kesesuaian lahan eksisting terhadap rencana tata ruang Kabupaten Banyuasin untuk selanjutnya diinterpretasi. Adapun interpretasi data yang digunakan sebagai dasar dalam analisis kebijakan untuk penyusunan kriteria kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari:

1. Sesuai (S) berarti bahwa penggunaan lahan yang sudah ada atau yang direncanakan sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan dalam dokumen dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Contohnya, penggunaan lahan untuk kegiatan komersial di kawasan yang diperuntukkan bagi perdagangan dan jasa.
2. Tidak Sesuai (TS) berarti penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam dokumen dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Contohnya, pembangunan industri di kawasan yang

seharusnya berfungsi sebagai area konservasi, seperti hutan mangrove.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin

Perubahan penggunaan lahan yaitu peralihan dari satu jenis pemanfaatan lahan ke jenis lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban dan meningkatnya kebutuhan manusia, proses penggunaan lahan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Semakin besar kebutuhan manusia, semakin tinggi pula permintaan terhadap lahan. Perubahan fungsi lahan ini berdampak pada tata ruang dan keseimbangannya.

Evaluasi kesesuaian implementasi ruang terhadap RTRW Kabupaten Banyuasin bertujuan untuk menentukan apakah penggunaan ruang yang telah diterapkan selaras dengan perencanaan tata ruang wilayah yang berlaku di Kabupaten Banyuasin. Pemanfaatan ruang yang terjadi di suatu area merupakan wujud nyata dari implementasi RTRW. Informasi mengenai luas dan proporsi kesesuaian Kawasan Perkotaan Jakabaring pada periode tahun 2013, 2018, dan 2023 tersaji dalam tabel 2 berikut.

Tabel 1. 2 Luas dan Proporsi Kesesuaian Lahan di Kawasan Perkotaan Jakabaring Tahun 2013, 2018 dan 2023

Peruntukan Pola Ruang	Kondisi Eksisting Kawasan	Luas Ketidaksesuaian Peruntukan Rencana Tata Ruang		
		Tahun 2013	Tahun 2018	Tahun 2023
Badan Air	Lahan Terbuka	15,18	-	-
	Pertanian Lahan Kering	0,33	0,33	0,33
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak / kebun campur	1,39	0,87	-
	Semak Belukar Rawa	5,38	-	-
	Perkebunan	-	1,56	2,42
	Rawa	-	1,33	0,92
	Sawah	-	18,24	18,19

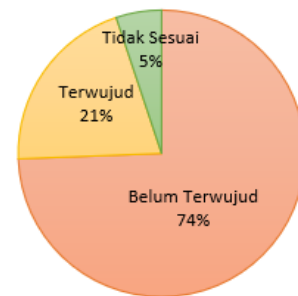
	Pemukiman/Lahan Terbangun	-	-	0,41
Kawasan Perlindungan Setempat	Lahan Terbuka	50,72	-	-
	Pemukiman / Lahan terbangun	6,81	6,82	11,57
	Pertanian Lahan Kering	15,18	10,41	10,41
	Sawah	0,04	136,97	135,89
	Semak Belukar Rawa	94,67	8,56	3,80
	Perkebunan	-	4,77	4,77
	Rawa	-	0,98	0,98

Berdasarkan tabel diatas ketidak sesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Banyuasin terdapat pada tahun 2018 dengan luas ketidaksesuaian mencapai 190,83 Ha. Ketidaksesuaian terhadap rencana pola ruang RTRW terdapat pada penggunaan lahan eksisting berupa sawah dengan peruntukan pola ruang kawasan perlindungan setempat dengan luas mencapai 136,97. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh dominasi penggunaan lahan di kecamatan ini untuk pertanian dan lahan kosong yang memiliki nilai sewa lahan (land rent) rendah. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mengubah lahannya menjadi jenis penggunaan dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Selain itu, jauhnya jarak kecamatan dari pusat kota mengakibatkan rendahnya pengawasan aparat terhadap berbagai penyimpangan dalam pemanfaatan ruang (Listiawan, 2010).

Sedangkan jika dilihat pada tahun 2013 ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Banyuasin terdapat pada penggunaan lahan eksisting semak belukar rawa dengan luas mencapai 94,67 Ha dengan peruntukan pola ruang kawasan perlindungan setempat. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2023, tingkat kesesuaian penggunaan lahan eksisting semak belukar rawa terhadap peruntukan pola ruang mengalami penurunan, mencapai 3,80 Ha pada tahun 2023. Peningkatan ketidaksesuaian

penggunaan lahan terhadap pola ruang terletak pada penggunaan lahan sawah dimana terjadi peningkatan pada tahun 2018 mencapai 136,97 Ha dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 135,89 Ha.

Kesesuaian pemanfaatan ruang juga dilakukan terhadap pemanfaatan ruang dengan kondisi eksisting berdasarkan pengamatan langsung di lokasi dan pengamatan melalui peta dari citra satelit dibandingkan dengan Rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 Diagram Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Tabel 3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan dan peta berikut ini :

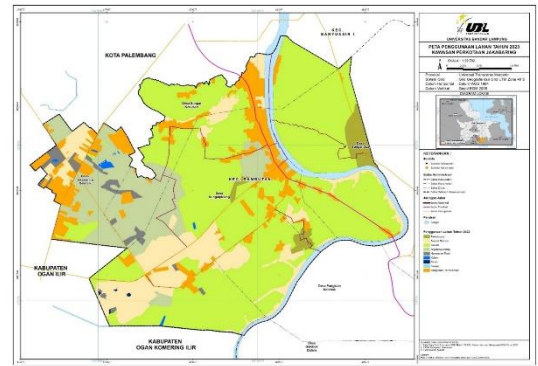


Gambar 1.3 Diagram Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Jakabaring

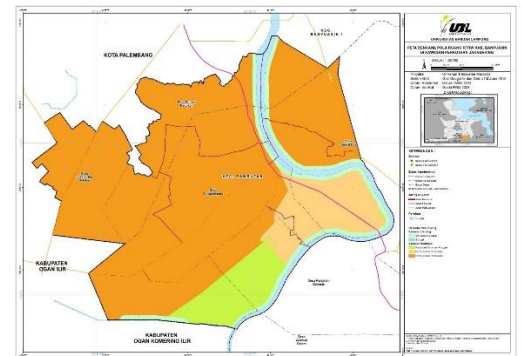
Adapun total luas ketidaksesuaian yang dihasilkan dari hasil analisis overlay peta sebesar 190,05 Ha atau sebesar 5,13% dari total luas wilayah sedangkan sisanya yaitu sebesar 758,59 Ha atau 20,47% sesuai dan 2.756,73, Ha atau 74,04% masih belum terwujud. Ketidaksesuaian yang terbesar yaitu pada rencana pola ruang lindung sempadan sungai yang secara eksisting dimanfaatkan untuk bangunan permukiman, sawah, semak belukar, perkebunan, kolam dan tegalan.

Tabel 1. 3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Jakabaring

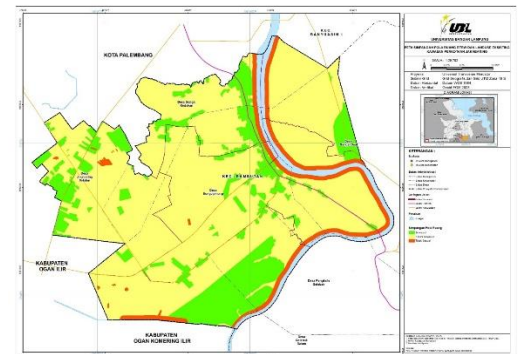
Pola Ruang	Belum Terwujud (Ha)	Terwujud (Ha)	Tidak Sesuai (H)	Grand Total (Ha)
Kawasan Perkotaan Jakabaring	2.756,73	759,58	190,05	3.706,35
Kawasan Tanaman Pangan	14,65	249,32	1,13	265,1
Semak Belukar	14,59			14,59
Tegalan/Ladang	0,05			0,05
Sawah		249,32		249,32
Sungai			1,13	1,13
Permukiman Pedesaan	341,87	21,06	-	341,87
Perkebunan	19,76			19,76
Sawah	293,56			293,56
Semak Belukar	28,55			28,55
Bangunan Permukiman		21,06		21,06
Permukiman Perkotaan	2400,22	342,29	9,85	2752,36
Hamparan Pasir	59,16			59,16
Perkebunan	61,97			61,97
Sawah	293,56			293,56
Semak Belukar	408,29			408,29
Tegalan/Ladang	511,10			511,1
Bangunan Permukiman		342,29		342,29
Kolam			7,48	7,48
Rawa			1,58	1,58
Sungai			0,52	0,52
Sempadan Sungai	-	0,89	178,58	179,47
Sempadan sungai		0,89		0,89
Bangunan Permukiman			27,86	27,86
Kolam			0,63	0,63
Perkebunan			4,80	4,8
Sawah			94,75	94,75
Semak Belukar			48,18	48,18
Tegalan/Ladang			2,36	2,36
Sungai	-	146,01	0,49	146,5
Sungai		146,01		146,01
Bangunan Permukiman			0,49	0,49
Sawah			0,001	0,001



Gambar 1. 4Peta Penggunaan Lahan Hasil Pengamatan di Kawasan Perkotaan Jakabaring



Gambar 1. 5 Peta RTRW di Kawasan Perkotaan Jakabaring



Gambar 1. 6 Peta Overlay Simpangan RTRW dan Kondisi Eksisting di Kawasan Perkotaan Jakabaring

### 3.2. Strategi Pengendalian Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Perkotaan Jakabaring

Strategi pengendalian yang disusun dalam penelitian ini berdasarkan integrasi antara hasil analisis spasial, hasil survei, serta wawancara dengan pihak terkait. Strategi dikelompokkan menjadi pendekatan: pencegahan, pengendalian, dan

pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4. Strategi Pengendalian Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Perkotaan Jakabaring.

Tabel 1. 4Gambar 1. 7Strategi Pengendalian Perubahan Penggunaan Lahan di Perkotaan Jakabaring

Strategi	Deskripsi
Pencegahan Konversi	Penetapan zona perlindungan dan pelarangan alih fungsi lahan produktif
Pengendalian Kegiatan Konversi	Penetapan regulasi dan evaluasi perizinan penggunaan lahan
Insentif dan Disinsentif	Pemberian insentif pada pelestarian lahan dan sanksi atas pelanggaran
Teknologi Pemantauan	Penggunaan SIG dan citra satelit untuk pemantauan dinamis
Partisipasi Publik	Pelibatan masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan dan pengambilan keputusan

Strategi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan di kawasan perkotaan.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil analisis kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018 dengan luas ketidaksesuaian mencapai 190,83 Ha. Ketidaksesuaian terhadap rencana pola ruang RTRW terdapat pada penggunaan lahan eksisting berupa sawah dengan peruntukan pola ruang kawasan perlindungan setempat dengan luas mencapai 136,97 Ha. Ketidaksesuaian ini terjadi karena sebagian besar lahan di kecamatan ini digunakan untuk pertanian dan lahan kosong yang memiliki nilai sewa lahan (land rent) rendah. Akibatnya, masyarakat terdorong untuk mengalihkan penggunaan lahannya ke jenis yang memiliki nilai sewa lebih tinggi. Sedangkan jika dilihat pada tahun 2013 ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah di Kab. Banyuasin terdapat pada penggunaan lahan eksisting semak belukar rawa dengan luas mencapai 94,67 Ha dengan peruntukan pola ruang kawasan perlindungan setempat. Dan untuk rekomendasi strategi pengendalian terhadap perubahan penggunaan lahan di kawasan perkotaan Jakabaring

Kabupaten Banyuasin dapat dilakukan dengan menerapkan upaya pengendalian konversi lahan, yaitu: meminimalkan peluang terjadinya konversi lahan, mengendalikan kegiatan konversi lahan, dan penggunaan instrumen pengendalian konversi lahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Putri, A., & Herwangi, Y. (2023). Pengaruh Infrastruktur terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Perkotaan. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 18(2), 112–125.
- Putri, A., & Yamin, Z. (2018). Dampak Urbanisasi terhadap Lahan Pertanian di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 14(1), 45–56.
- Sigit, A., & Setiawan, B. (2019). Transportasi dan Aksesibilitas dalam Perubahan Tata Guna Lahan. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 11(3), 201–215.
- Sugiri, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Wilayah Metropolitan terhadap Perubahan Penggunaan Lahan. *Jurnal Planologi*, 20(1), 33–47.